

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari & Setiaji, Wirawan, 2007, 'Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)', Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Badan Pusat Statistik 2018, Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota, 2016 (Metode Baru), Website Badan Pusat Statistik, diakses 22 Februari 2018, <<https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/09/05/1269/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-2016-metode-baru.html>>
- Bratakusumah, Supriady & Solihin, Dadang, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fitriyanti, Ismi Rizky & Pratolo, Suryo, 2009, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi', Penelitian Keuangan Akuntansi Sektor Publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri, Bidakara, 2-3 Juni 2009.
- Fuadi, 2016, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Deepublish, Yogyakarta.
- Halachmi, Arie, 2005, 'Performance Measurement is Only One Way of Managing Performance', *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 54, hlm. 502-516
- Halim, Abdul, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat, Jakarta.
- Handra, Hefrizal & Maryati, Sri, 2009, 'Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak Pemerintah Propinsi Sumatra Barat', Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II Badan Litbang Departemen Dalam Negeri.
- Kunarjo, 1996, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Mahmudi, 2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2009, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 *tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT

Gramedia Widiasarana, Jakarta.

- Pangkey, Imanuel & Pinatik, Sherly 2015, 'Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 *tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009*.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 *tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010*.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011*.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 *tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012*.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2014 *tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013*.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 *tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014*.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 *tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2017 *tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sumenge, Ariel Sharon, 2013, 'Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Suparmoko, M, 1991, *Pengantar Ekonomika Makro*: BPFE, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 *tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.